



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

# Pengurangan Subsidi Transportasi Diklaim Tak Ganggu Pelayanan

Anggaran subsidi transportasi yang ditetapkan hanya mencukupi hingga Oktober 2020.

**Gangsar Parikesit**

gangsar@tempo.co.id

**JAKARTA** — Pemerintah DKI Jakarta menjamin standar pelayanan angkutan publik di Ibu Kota tidak akan menurun meski anggaran subsidi transportasi untuk tahun depan dipangkas. Pemerintah juga tidak akan menaikkan tarif moda transportasi utama di Jakarta, yaitu bus Transjakarta, *mass rapid transit* (MRT), dan *light rail transit* (LRT).

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat DKI, Sri Haryati, menuturkan badan usaha milik daerah (BUMD) yang menjadi operator MRT, LRT, dan Transjakarta telah berkomitmen untuk tidak mengurangi pelayanan. "Tidak ada *excuse* (alasan) untuk menurunkan pelayanan," kata dia di Balai Kota Jakarta, kemarin.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta sepakat memangkas anggaran subsidi transportasi atau *public service obligation* (PSO) untuk MRT, LRT, dan Transjakarta pada 2020 sebesar Rp 1,1 triliun. Pengurangan itu disepakati dalam rapat Badan Anggaran pada pekan lalu.

Sebelumnya, rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 menyebutkan anggaran subsidi untuk tiga moda transportasi itu sebesar Rp 6,94 triliun. Belakangan, pemerintah merevisi dana PSO

menjadi Rp 5,6 triliun. Setelah pembahasan rancangan KUA-PPAS 2020 di tiap komisi rampung, ternyata rancangan anggaran daerah masih defisit Rp 10 triliun. Walhasil, untuk menyeimbangkan neraca keuangan daerah, pemerintah dan Dewan mengurangi dana subsidi itu menjadi Rp 4,54 triliun.

Sri menjelaskan pemerintah DKI akan mengusulkan tambahan anggaran subsidi saat menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2020. "Kalau masih kurang, ya kami siapkan dalam APBD Perubahan," kata dia.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafirin Liputo mengatakan, meski alokasi subsidi tiket MRT, LRT, Transjakarta berkurang Rp 1,1 triliun, dana PSO itu mencukupi hingga Oktober 2020. Adapun kekurangannya akan dianggarkan dalam APBD Perubahan mendatang.

Anggota Badan Anggaran DPRD Jakarta, Gembong Warsono, heran terhadap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) karena mengusulkan pemangkasan anggaran subsidi transportasi. Padahal, menurut dia, banyak program yang anggarannya bisa dikurangi agar neraca keuangan DKI tidak defisit. Gembong menilai pemberian PSO itu justru penting untuk mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.

Gembong khawatir rencana pemerintah untuk

menaikkan subsidi transportasi melalui perubahan anggaran tidak bisa dipenuhi pada tahun depan. "Nanti, kalau ekonomi ke depan buruk, *gimana?* Masak November dan Desember mendatang tidak ada subsidinya?" tutur Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu.

Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), Iskandar Abubakar, menyarankan agar PT MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan Transjakarta menekan

biaya operasional agar subsidi yang dialokasikan oleh pemerintah bisa cukup hingga akhir tahun. "Yang tak kalah penting, pelayanannya jangan dikorbankan," kata dia.

Selain itu, kata Iskandar, tiga perusahaan daerah itu juga harus kreatif mencari pendapatan non-tiket. Tujuannya, agar pengoperasian MRT, LRT, dan Transjakarta tidak hanya mengandalkan subsidi dari pemerintah DKI.

• TAUFIQ SIDDIQ

## Subsidi Naik

ASISTEN Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah Jakarta, Sri Haryati, mengatakan pengajuan anggaran subsidi transportasi dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 telah melalui pelbagai pertimbangan. Besaran subsidi itu juga memperhitungkan penambahan jumlah penumpang pada tahun depan. "Masing-masing sudah ada proyeksinya," kata dia.

Berikut ini data alokasi subsidi transportasi:

### 2018

- Transjakarta Rp 3,32 triliun.

### 2019

- MRT Jakarta Rp 672,3 miliar.
- LRT Jakarta Rp 278,3 miliar.
- Transjakarta Rp 2,76 triliun.

### Total Rp 3,7 triliun.

### Tahun 2020 \*

- MRT Jakarta Rp 825 miliar.
- LRT Jakarta Rp 439,6 miliar.
- Transjakarta Rp 3,29 triliun.

### Total Rp 4,54 triliun.

**Keterangan:** \*kesepakatan rancangan KUA-PPAS 2020 pemerintah DKI dan DPRD Jakarta. Pada 2018, MRT Jakarta dan LRT Jakarta belum beroperasi.

• SUMBER: PEMERINTAH DKI JAKARTA